


PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI 2015-2021

Caesar Muslim^{1*}, Zainuddin Saenong², Hastuti³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Indonesia

*Korespondensi : caesar.muslim@uho.ac.id

<p>Info Artikel</p>	<p>Abstrak</p>
<p>Diterima : 12 November 2023 Disetujui : 16 November 2023 Dipublikasikan : 30 November 2023</p>	<p>Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting karena memberikan dasar untuk evaluasi, pengelolaan yang efektif, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya keuangan publik. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Kendari; (2) Untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kendari; (3) Untuk mengetahui Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Kendari. Adapun Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam mewujudkan basis PAD target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan Rasio Efektivitas tergolong Masih Belum Efektif. (2) Rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2015-2021 yang menghasilkan jumlah rata-rata 20,87% (kemampuan masih sangat rendah) dengan pola hubungan instruktif. Artinya ketergantungan pemerintah Kota Kendari masih sangat tinggi mengenai sumber dana bantuan dari pihak eksternal, baik dari pemerintah pusat serta dari pemerintah provinsi. (3) Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kendari jika dirata-ratakan dari tahun 2015-2021 yaitu 47,09% atau termasuk pada kriteria Cukup.</p>
<p>Kata Kunci: Rasio Efektifitas, Rasio Kemandirian, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah Keyword: Effectiveness Ratio, Independence Ratio, Regional Finance, Regional Original Income</p>	<p>Abstract <i>Measuring local government financial performance is very important because it provides a basis for evaluation, effective management and accountability in the management of public financial resources. This research aims: (1) To determine the Regional Tax Effectiveness Ratio for Kendari City; (2) To find out the Kendari City Regional Financial Independence Ratio; (3) To find out the Ratio of Regional Tax Contribution to Kendari City PAD. The results of this research show that: (1) The Financial Performance of the Kendari City Regional Government in realizing the target PAD base that was previously determined using the Effectiveness Ratio is classified as Still Not Effective. (2) Regional financial independence ratio during 2015-2021 which produces an average of 20.87% (capacity is still very low) with an instructive relationship pattern. This means that the dependence of the Kendari City government is still very high regarding sources of aid funds from external parties, both from the central government and from the provincial government. (3) The contribution of Regional Tax to Kendari City's PAD, averaged from 2015-2021, is 47.09% or falls under the Adequate criteria.</i></p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan daerah yang baik merupakan cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah dan ditopang oleh dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kebijakan Otonomi Daerah UU No. 32 Tahun 2004, setiap daerah harus mampu membiayai daerahnya sendiri melalui sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Rahmayati (2016) mengungkapkan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di sektor keuangan. Kinerja keuangan sangat penting dalam menunjang tujuan dan sasaran program dalam perencanaan strategis.

Menurut Halim (2012), keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah yang ingin dicapai tujuan regional yang diinginkan. Alat untuk melaksanakan manajemen Keuangan daerah adalah pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan umum dan administrasi bisnis keuangan yang sekarang dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada kemajuan suatu negara daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efisien, ekonomis dan efektif atau memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ada banyak pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang saat ini dilakukan, antara lain dengan melihat rasio antara PAD dan APBD. Prinsipnya, kontribusi PAD terhadap APBD akan semakin besar menunjukkan bahwa wilayah tersebut kurang bergantung pada pemerintah tengah. Sehingga diharapkan daerah mempunyai tingkat kejelian dan kejelian yang tinggi kemampuan melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki.

Perkembangan perekonomian Kota Kendari mempunyai prospek dan peluang yang sangat besar memacu pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu pengukuran nilai tambah yang dihasilkan akibat keberadaan berbagai perekonomian di suatu wilayah. Data Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu daerah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Nilai PDRB Kota Kendari pada tahun 2016 sebesar Rp.14.065.907.000, Dan pada tahun 2017 telah meningkat menjadi

Rp.14.826.049.067.

Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Kendari terdiri dari 10 kecamatan dan 64 kelurahan, Kendari juga memiliki sumber pendapatan yang potensial untuk dioptimalkan pembedayaannya. Kota Kendari memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu: (1) PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dilihat dari realisasi penerimaan PAD tahun 2019 masih belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar Rp. 460 miliar dengan realisasi Rp.215 Miliar atau hanya 46,78%. Sedangkan pada tahun 2020 realisasinya Pendapatan PAD mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan sebesar Rp.219 Miliar dengan realisasi Rp. 221 Miliar atau 62,84% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021, realisasi pendapatan kembali mengalami penurunan dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 488 Miliar dan realisasinya hanya Rp. 298 Miliar atau 53,45%.

Pendapatan asli daerah kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara mengalami mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, namun peningkatannya cenderung berfluktuasi. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi setiap tahunnya juga menunjukkan sumber daya keuangan yang tinggi dimiliki oleh daerah tersebut. Jika sumber keuangan yang Anda miliki mampu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, sehingga memberikan cerminan kinerja pemerintah lokal. Potensi yang dimiliki daerah tersebut diharapkan dapat tercapai serta dimanfaatkan dengan baik sehingga sumber keuangan bersumber dari pendapatan asal daerah bisa meningkat. Hal ini menuntut pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah karena kewenangan yang ada pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah Penerimaan Pajak Daerah Kota Kendari telah tergolong Efektif?, (2) Bagaimana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kendari?, (3) Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kendari?

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Kendari; (2) Untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kendari; (3) Untuk mengetahui Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Kendari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, dengan objek penelitian Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data keuangan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2015-2021. Semua data-data ini diperoleh dari: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari, Kantor Badan Pusat Statistik Kota Kendari, dan BAPPEDA Kota Kendari. Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Rasio Efektifitas, Rasio Kemandirian serta Rasio Kontribusi.

Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Abdul Halim, 2004):

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai, mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Rasio Kemandirian

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain seperti pinjaman atau bantuan dari pemerintah pusat menunjukkan kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3.1. Kriteria Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan
0-25	Rendah Sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Halim (2004)

Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang mengukur seberapa besar penerimaan pajak berkontribusi terhadap total PAD suatu daerah. PAD mencakup seluruh sumber pendapatan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lainnya.

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan mengukur rasio kontribusi penerimaan pajak terhadap total PAD, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana pajak berkontribusi terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang signifikan dalam menghasilkan PAD, sementara rasio yang rendah mungkin menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada sumber pendapatan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari tahun 2015–2021. Ada Tiga macam rasio kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Serta Rasio Kontribusi.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas pajak daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penerimaan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak yang sebenarnya. Rasio ini membantu menilai seberapa efisien dan berhasilnya pemerintah daerah dalam mengenakan dan mengumpulkan pajak.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2021

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2015	83	Non Efektif
2016	96	Non Efektif
2017	98	Non Efektif
2018	87	Non Efektif
2019	92	Non Efektif
2020	108	Efektif
2021	50	Non Efektif

Sumber: BPS Kota Kendari (diolah)

Berdasarkan Tabel.2 diatas, menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas pemerintah daerah Kota Kendari tahun anggaran 2015 sebesar 83,67%. Berdasarkan kriteria pengukuran dari Depdagri, maka rasio efektivitas tahun anggaran 2015 berada dalam kategori Kurang Efektif, demikian juga halnya pada anggaran tahun 2018 dengan rasio 87,77% atau kategori Tidak efektif. Begitu pula halnya rasio efektivitas pemerintah daerah kota Kendari tahun anggaran 2016 adalah 96,95% atau kategori cukup efektif, demikian halnya rasio efektivitas pemerintah daerah kota Kendari tahun anggaran 2017 sebesar 98.63% atau kategori cukup efektif. Demikian juga tahun anggaran 2019 rasio efektivitasnya adalah 92.19% atau berada dalam kategori Cukup Efektif.

Hal ini berbeda dengan tahun anggaran 2020, rasio efektivitas pemerintah daerah kota Kendari mengalami peningkatan yaitu sebesar 108,23%. Berdasarkan Kriteria pengukuran Dari Depdagri, maka Rasio Efektivitas tahun anggaran 2020 berada dikategori Efektif, karena berada di atas 100%. Namun berbeda dengan tahun 2021, rasio efektivitasnya mengalami penurunan yaitu hanya 50.60%, berdasarkan kriteria pengukuran dari Depdagri maka Rasio Efektivitas tahun anggaran 2021 berada dikategori Tidak Efektif.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mengandalkan sumber daya keuangan lokalnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana atau bantuan dari pemerintah pusat. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Tabel 3. Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Kendari Tahun 2015-2021

Tahun	Kemandirian (%)	Keterangan
2015	15	Rendah Sekali
2016	17	Rendah Sekali
2017	23	Rendah Sekali
2018	17	Rendah Sekali
2019	20	Rendah Sekali
2020	22	Rendah Sekali
2021	28	Rendah

Sumber: BPS Kota Kendari (diolah)

Dari hasil perhitungan pada Tabel.3 di atas terlihat bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kendari sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sangat rendah yaitu antara 15,60% sampai dengan 23,97% yang bersifat instruktif. Nilai terendah sebesar 15,60% pada tahun 2015, dan nilai tertinggi sebesar 28,71% pada tahun 2021. Namun berbeda dengan tahun 2021, rasio kemandirian keuangan daerah kota Kendari mengalami peningkatan yaitu 28.71%, tetapi tetap saja masih terhitung rendah atau konsultatif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Kendari selama tujuh tahun terakhir masih sangat rendah dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Kendari dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi realisasi pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengukur seberapa besar penerimaan pajak berkontribusi terhadap total PAD suatu daerah, dengan memperhitungkan realisasi atau pelaksanaan aktual dari target penerimaan pajak.

Tabel 4. Rasio Kontribusi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2015-2021

Tahun	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	45	Baik
2016	50	Sangat baik
2017	18	Kurang
2018	58	Sangat baik
2019	55	Sangat baik
2020	52	Sangat baik
2021	48	Baik

Sumber: BPS Kota Kendari (diolah)

Berdasarkan Tabel.4 diatas, menunjukkan bahwa kontribusi dari Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah kota Kendari tahun 2015–2021 adalah rata-rata 47,09% atau kategori cukup. Adapun kontribusi dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam kategori sangat baik adalah tahun 2016, 2018, 2019 dan tahun 2020. Untuk kategori baik adalah tahun 2015 dan 2021. Sedangkan kategori kurang tahun 2017.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Rasio Efektifitas, Rasio Kemandirian, serta Rasio Kontribusi dalam upaya melakukan pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2015-2021, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam mewujudkan basis PAD target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan Rasio Efektifitas tergolong Masih Belum Efektif. (2) Rasio kemandirian keuangan daerah selama 7 tahun (2015-

2021) yang menghasilkan jumlah rata-rata 20,87% (kemampuan masih sangat rendah) dengan pola hubungan instruktif. Artinya ketergantungan pemerintah Kota Kendari masih sangat tinggi mengenai sumber dana bantuan dari pihak eksternal, baik dari pemerintah pusat serta dari pemerintah provinsi. (3) Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kendari jika dirata-ratakan dari tahun 2015-2021 yaitu 47,09% atau termasuk pada kriteria Cukup.

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan sebelumnya maka saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya lebih meningkatkan tax effort sehingga potensi-potensi pajak yang ada di Kota Kendari bisa terserap semaksimal mungkin. (2) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak sekaligus memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak seperti penggunaan aplikasi mobile. Sehingga kemampuan masyarakat juga diiringi dengan kemauannya dalam membayar pajak. (3) Upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi maupun ekstensifikasi potensi/sumber Pajak Daerah dalam upaya mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Mujiwardhani. (2008). ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN CILACAP SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH (TINJAUAN KEUANGAN DAERAH). (Skripsi) FE UNS Surakarta. Tidak dipublikasikan.
- Badan Pusat Statistik. (2021). KENDARI DALAM ANGKA 2021. Kendari: Badan Pusat Statistik Kota Kendari.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari. (2021). PROYEKSI APBD TAHUN ANGGARAN 2021. Kendari: BAPPEDA Kota Kendari.
- Halim, A. (2012). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (EDISI 4). Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi, M. (2016). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rahmayati, A. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2011-2013. Eka Cida, 1(1). Journal Amikom Solo.
- Undang-Undang RI. 2004 Nomor 32 Tahun 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.